

OPTIMALISASI DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN

Rissa Ayustia dan Dokman Marulitua Situmorang
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana
ayustia.rissa@shantibhuana.ac.id dan van_stmng@yahoo.com

***Abstract.** The optimization of village funds provided by the central government has increased every year and is expected to support the acceleration of village development in border areas through economic independence in accordance with four programs from the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Migration Development. The research objective is to determine the extent to which optimization of village funds begins in terms of utilization for the construction of physical infrastructure, social services, economic development and community empowerment. Data collection techniques in this study used observation, interview and documentation techniques. Data analysis is done by collecting, reducing the presentation and verification of data or drawing conclusions. Data collection methods in this study use qualitative data analysis methods with the aim of getting a comprehensive picture. The results of this study are the village funds provided by the central government are fully used for village development programs but in the initial planning process is still less than optimal because in the implementation of musrembang the level of activeness of community leaders in providing less input so that the village development program is only from the village government not from the aspirations of the community so that programs for the field of community empowerment are still lacking in attention. At the time the accountability was also not optimal because it did not carry out a joint evaluation with the community and was not in accordance with the principles of management and the purpose of village funds because there was no transparency to the community.*

Keywords: *Optimization, Village Funds, Border Areas, Villages, Empowerment of Border Communities*

ABSTRAK. Optimalisasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahun diharapkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa di daerah perbatasan melalui kemandirian perkonomian sesuai dengan empat program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi dana desa dimulai dari segi pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur fisik, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi penyajian dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Hasil penelitian ini adalah Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk program pembangunan desa tetapi dalam proses perencanaan awal masih kurang optimal karena dalam pelaksanaan musrembang tingkat keaktifan tokoh masyarakat dalam memberikan masukan kurang sehingga program pembangunan desa hanya dari pemerintah desa bukan dari aspirasi masyarakat sehingga program untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang diperhatikan. Pada saat pertanggungjawaban juga masih belum optimal karena tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat.

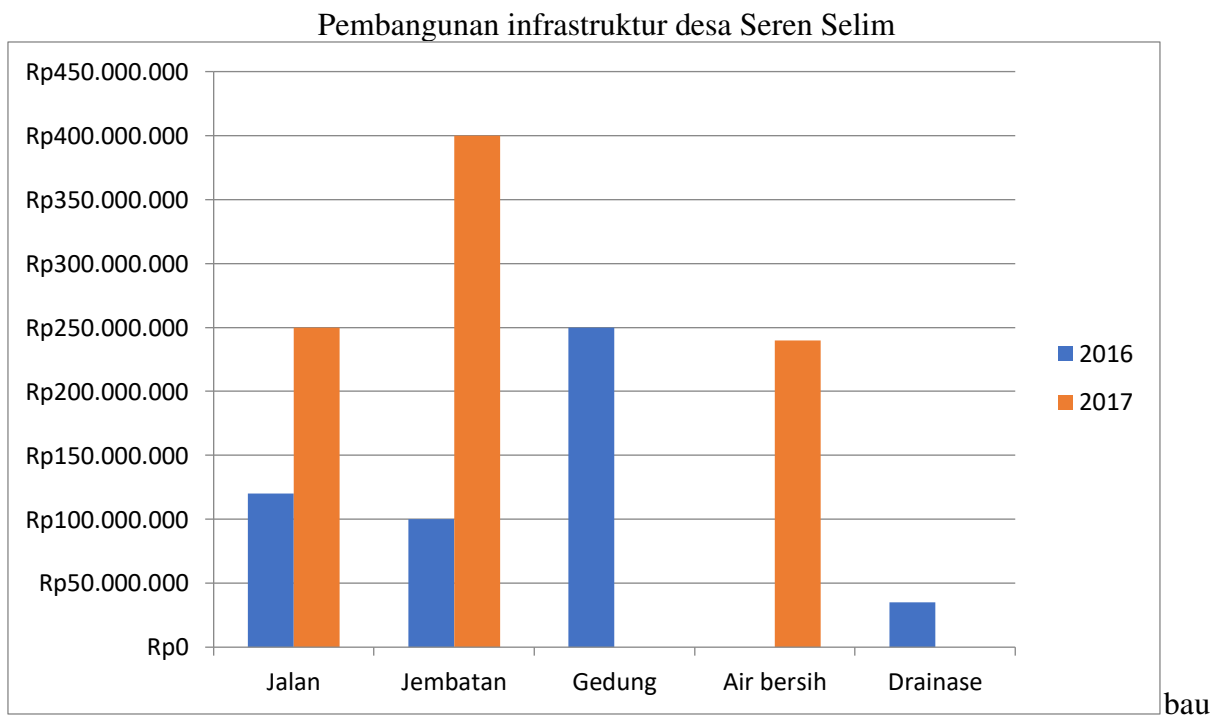
Kata Kunci : Optimalisasi, Dana desa, Daerah perbatasan, Desa, Pemberdayaan masyarakat perbatasan

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan biasanya identik dengan daerah tertinggal karena kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Kawasan perbatasan di Indonesia sebagian besar merupakan kawasan tertinggal, ini dibuktikan dari kontribusi ekonomi sebesar 0,1% dari ekonomi nasional karena lokasi kawasan yang terpencil atau terisolir dengan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, tingkat kesehatan masyarakat, tingkat aksesibilitas, dan blank spot. Optimalisasi dana desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahun diharapkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa khususnya desa-desa yang berada di daerah perbatasan melalui kemandirian perekonomian sesuai dengan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saat ini bentuk dari kepedulian pemerintah pusat ke daerah perbatasan hanyalah untuk pembangunan infrastruktur fisik dan belum sepenuhnya digunakan untuk program prioritas Kemendes yakni seperti Pembentukan BUMDes, PRUKADES, Pembangunan sarana olahraga desa (Raga Desa), dan pembangunan embung air desa.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten yang sangat luas sehingga memiliki 17 kecamatan. Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bengkayang adalah kecamatan Lumar dengan luas wilayahnya adalah 275,21 km² (5,10% dari luas kabupaten Bengkayang). Kecamatan Lumar terdiri dari beberapa desa, letak desa Seren selimbau jauh dari ibukota kabupaten Bengkayang sehingga desa ini terisolir atau terpencil dengan tingkat pendidikan yang kurang, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, tingkat kesehatan masyarakat (gizi buruk dan stunting), dan belum adanya listrik dari pemerintah.

Grafik 1.1



Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 adanya pembangunan jembatan dan jalan yang merupakan infrastruktur yang tidak produktif, pembangunan infrastruktur sangat mendominasi penggunaan dana desa. Dari total dana desa yang terserap didesa seran selimbau sebanyak Rp 1.000.000.000.00 ada sekitar 50 % dipakai untuk penggunaan infrastruktur sehingga tidak sesuai dengan program prioritas kemendes. Berdasarkan hasil data diatas dengan survey sementara peneliti melihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi desa tersebut sangat lambat.

KAJIAN TEORI

Optimalisasi. Optimalisasi menurut kamus besar bahasa indonesia ialah tertinggi. Paling baik, sempurna, paling tinggi, menjadi maksilamal. Optimalisasi berarti pengoptimalan. Menurut Hotniar Siringoringo (Yogyakarta Graha Ilmu,2005,h,4), Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalisasi adalah meminimumkan biaya. Menurut Machfud Sidik, berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Menurut Depdikbud (1995,h,628) optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau menetapkan. Optimalisasi merupakan proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada, optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya. Yaitu sperti meningkatkan keuntungan. Meminalisir waktu proses dan sebagainya. (<http://repositiry.usu.ac.id/bitstream/3/chapter%2011.pdf>) diakses pada tanggal 10 juni 2016 pukul 11:46.19. menurut tim penyusun mengoptimalkan. Berarti menjadi paling baik, cara atau paling menguntungkan. (<http://adesidiq.blogspot.co.id/2011/01/ptk/vcd,html>) diakses pada tanggal 10 juni 2016 pukul 11.13. pengertian optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien “. Optimalisasi banyak juga dia artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat di definisikan sebagai berikut 1) menurut winardi (1999,h.363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah suatu memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (12.40.2)singiresu S.rao jhon wiley dan sons ((2009) optimalisasi juga dapat di definisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi, (<http://thesis.bhinus.ac.id/doc/bab2/2012-1-00531-MTIF%202.PDF>). Diakses pada tanggal 10 juni 2016 pukul 12.41.20 penjelasan diatas diketahui bahwa optimalisasi hanya diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien optimal.

Dana Desa, undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah masyarakat setempat dalam sitem pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintah negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBN) Yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) setelah dikurangi dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan menteri keuangan nomor 247 tahun 2015. yaitu: dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembanguana dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber masyarakat setempat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat setempat. Untuk meningkatkan pelayanan publik didesa dan mengentaskan kemiskinan, memperkuat subjek pembangunan .

Daerah perbatasan. Pengertian daerah perbatasan bisa di artikan suatu wilayah yang berada di perbatasan antar daerah dalam suatu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara. Pada wilayah seperti ini komunikasi atau interaksi antar penduduk di dua daerah atau dua negara yang berbatasan biasanya cukup intensif. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik dasar kordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan dengan hukum internasional dan nasional. Di 38 kabupaten/kota perbatasan prioritas terdapat 60 pulau dari keseluruhan 92 pulau kecil terdapat (65%) ; 20 pulau berpenghuni dan 40 lainnya tidak berpenghuni.

Pemberdayaan masyarakat perbatasan. Pemberdayaan masyarakat menurut sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Pemnerdayaan masyarakat perbatasan di era saat ini menghadapkan kita pada tantangan yang besar. Seperti eksploitasi ekonomi dan politik ketidakstabilan ekologi, Ekonomi, politik, sosial dan pelanggaran HAM. Dalam memberdayakan masyarakat perbatasan, pemerintah desa membutuhkan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan informan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Masyarakat harus mau dan mampu menjadi subjek pembangunan karena sejajar dengan perangkat desa dan mitra dari perangkat desa. Pemberdayaan masyarakat perbatasan diharapkan mampu untuk merespon kondisi dan permasalahan masyarakat perbatasan yang sangat spesifik serta membangun pemberdayaan yang memiliki perspektif jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian Kasus (Case Study), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instimen kunci. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang optimaliasi dana desa di daerah perbatasan (Studi Kasus Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang).

Fokus Penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana optimaliasi dana desa di daerah perbatasan bisa sesuai dengan program dari kementerian desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Studi Kasus Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang).

Teknik Penentuan Informasi. Teknik penentuan informan sangat penting karena narasumber yang mmemberikan informasi. Koentjaraningrat, (1993:89) menyatakan bahwa

penentuan informan sebagai sumber data lebih banyak menggunakan pertimbangan realitas sosial, artinya informan-informan yang mewakili masyarakat di pilih secara purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini di gunakan purposive sampling, yakni untuk mencari data yang sesuai kriteria yang telah di tentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat desa seren selimbau, camat lumar, kepala desa seren Selimbau, sekrtaris Desa Seren Selimbau, Bendahara Desa Seren Selimbau, KAUR desa Kepala Urusan Pemerintahan, Pendamping Kecamatan dan Desa.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif.

Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ini tahap dalam analisis data:

Tahap 1 :

Dalam tahap ini ketua dan anggota sama-sama melakukan tahap survey awal ke lokasi penelitian agar menemukan masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Tahap ini sangat penting diawal dalam menemukan data awal penelitian yang mana akan digunakan untuk mendapatkan masalah yang terjadi.

Tahap 2 :

Tahap ini ketua dan anggota memiliki tugas yang sama dalam merumuskan suatu masalah, dimana tahap ini ketua dan anggota saling mempelajari data-data yang didapat dilapangan, tahap ini akan menghasilkan suatu rumusan masalah yang penting dalam penelitian ini.

Tahap 3 :

Tahap ini ketua berperan penting dalam mencari teori yang terkait dalam penelitian ini, teori-teori yang penting dan relevan dalam penelitian ini.

Tahap 4 :

Tahapan ini bagian dari ketua penelitian karena didalam hal ini ketua harus mengetahui landasan teori yang baik dan tepat bagi penelitian ini.

Tahap 5 :

Ketua dan anggota peneliti berperan dalam tahap ini, agar mengetahui situasi dan kondisi yang nyata dari objek yang di teliti, serta melakukan pengambilan data ke pemerintah desa yang terkait didalam penelitian ini.

Tahap 6 :

Tahapan ini ketua dan anggota sama-sama berdiskusi dalam menentukan dan merumuskan hasil penelitian yang didapat baik secara teori dan secara observasi lapangan yang dilakukan oleh ketua peneliti dan anggota peneliti.

Tahap 7 :

Ketua dan anggota penelitian berperan dalam tahap ini, mengambil kesimpulan dan saran yang tepat bagi penelitian ini dan hasilnya mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di daerah perbatasan.

Tahap 8 :

Ketua dan anggota penelitian berperan mengambil bagian dalam pelaksanaan seminar hasil dan melakukan publikasi ilmiah.

Tahap 9 :

Hasil akhir penelitian akan diberikan kepada pihak terkait baik pemerintah desa maupun kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pemerintah desa Seren Selimbau, kecamatan Lumar - Kabupaten Bengkayang dalam menggunakan dana desa diawali dengan tahapan pembentukan tim kerja dan pada tahap perencanaan dilakukan dengan kegiatan musrembang. Dari hasil pengamatan peneliti yang ikut serta dalam kegiatan musrembang bahwasanya kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak lupa melibatkan seluruh elemen masyarakat misalnya seperti tokoh dan lembaga masyarakat. Tujuan diadakan musrembang desa adalah agar masyarakat desa dapat aktif menyusun rencana kegiatan dan menentukan kegiatan apa saja dalam pembangunan desa untuk dikerjakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak MRS yang menjabat sebagai KAUR Pembangunan Desa Seren Selimbau, berikut wawancaranya : *“Pelaksanaan penyusunan program kerja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai pemerintah desa dan masyarakat ”*. Akan tetapi hal yang berbeda dikatakan oleh ibu WDR terkait pelaksanaannya, berikut wawancaranya : *“Program kerja yang disampaikan merupakan program dari pemerintah desa yang belum berwujud ditahun sebelumnya dan akan dilaksanakan di tahun ini, beberapa tokoh masyarakat yang hadir saat ini tidak memberikan masukan program pembangunan desa padahal tokoh masyarakat tersebut sebagai perwakilan dari masyarakat desa”*. Hal ini sangat disayangkan dimana padahal seterusnya menjadi ajang bertukar pikiran antara masyarakat desa dengan pemerintah desa untuk mencari solusi yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyentuh seluruh masyarakat desa.

Tahapan selanjutnya setelah pemerintah desa mengajukan proposal ke pemerintah daerah untuk disetujui oleh bupati Bengkayang, setelah mendapatkan persetujuan maka pencairan dana desa dilaksanakan dalam II (dua tahapan) yakni tahap I, pada bulan maret sebesar 60 % dan tahap II pada bulan juni sebesar 40 %. Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima di rekening kas umum daerah. Total pendapatan desa seren selimbau sebesar Rp 1.330.234.200,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ratus rupiah). Dengan rincian sebagai berikut dana desa yang diterima oleh desa seren selimbau sebesar adalah Rp 839.884.000. (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh desa Seren

Selimbau adalah Rp 10.871.700. (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu tujuh ributujuh ratus). Setiap pengelolaan dana untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK). Berikut tabel pelaksanaan program kerja desa seren selimbau.

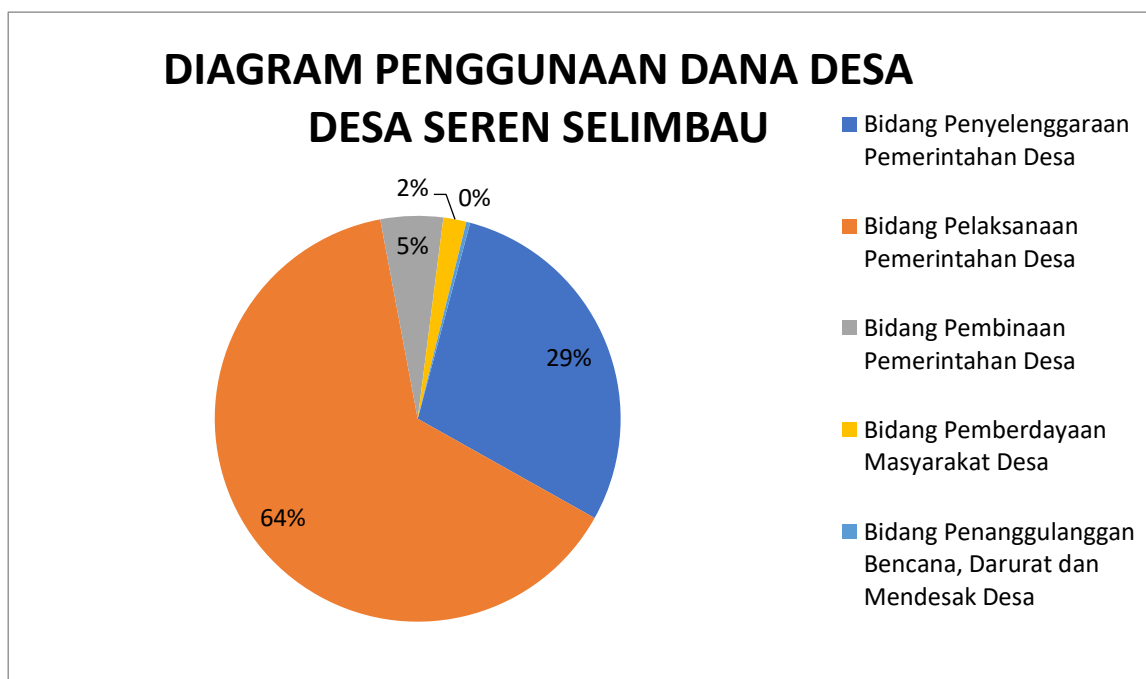
Tabel 1.1 tabel pelaksanaan program kerja desa seren selimbau

No	Nama Kegiatan	Jumlah	
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Rp 414.648.100,-
	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 336.828.572,-	
	Belanja Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 47.167.528,-	
	Belanja Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp 6.056.000,-	
	Belanja Tata Praja Pemerintah, Perencanaan dan Pelaporan	Rp 24.596.000,-	
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA		Rp 914.691.600,-
	Sub Bidang Pendidikan (Kegiatan PAUD)	Rp 22.230.000,-	
	Sub Bidang Kesehatan (Kegiatan Posyandu dan Poskesdes)	Rp 24.084.000,-	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembangunan Jembatan Beton)	Rp 135.000.000,-	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman (Rehap Jaringan Air Bersih Jelatok)	Rp 123.000.000,-	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman (Pansimas)	Rp 35.000.000,-	
	Sub Bidang Pembangunan Prasarana Energi Alternatif Desa (PLTMH)	Rp 575.377.600,-	
III	BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		Rp 71.353.420,-
	Kegiatan Pembangunan Poskamling Desa	Rp 8.878.800,-	
	Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban	Rp 12.233.000,-	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 14.968.600,-	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 7.835.000,-	
	Sub Bidang Kelembagaan Desa	Rp 27.438.020,-	
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Rp 26.293.140,-
	Sub Bidang Perikanan dan Kelautan	Rp 7.115.000,-	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 6.555.000,-	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp 8.480.000,-	

	dan Perlindungan Anak		
	Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp 4.143.140,-	
IV	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		Rp 4.438.680,-

Berdasarkan tabel 1.1 maka keseluruhan pendapatan desa digabungkan dan digunakan untuk menandai berbagai bidang diantaranya 64 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan oleh pemerintah desa untuk bidang pelaksanaan pemerintahan desa, 29% anggaran digunakan oleh pemerintah desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 5 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan oleh pemerintah desa untuk bidang pembinaan pemerintah desa, serta sisanya 2 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Berikut ini prosentase APBDes yang di sajikan dengan menggunakan diagram sebagai berikut :

Diagram 1. 1. APBDes Desa Seren Selimbau



Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBDes melalui hasil musyawarah desa hanya fokus dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, terlihat dari begitu banyak pembangunan fisik desa berupa Pembangunan Jembatan Beton, Rehap Jaringan Air Bersih Jelatok, Penasimas, Pembangunan Prasarana Energi Alternatif Desa PLTMH dan penggulangan bencana, darurat dan mendesak desa (Seperti : Perbaikan Jembatan Kayu yang rusak dan penimbunan batu kerikil jika ada jalan yang rusak total). Selain pembangunan fisik desa ada juga penggunaan dana untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini termasuk Belanja Sasaran dan Prasarana Pemerintah Desa (Operasional perkantoran seperti belanja barang dan service, Belanja Modal berupa pengadaan laptop dan juga Printer, ATK) Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Operasional Perangkat Desa, Operasional PKK,

Operasional LPM), Belanja Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Belanja administrasi Pemerintah, Perencanaan dan Pelaporan (Penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan Perencanaan dan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes). Dalam bidang pemberdayaan masyarakat adapun kegiatannya berupa Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan PAUD serta Kegiatan Posyandu dan Poskesdes. Dari hasil penelitian bisa dilihat bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa pada pemberdayaan masyarakat program yang ada itu masih sangat minim dan bukan menjadi tujuan utama dari pemerintah desa. Jika melihat dari tujuan penggunaan dana desa masih belum bisa dikatakan optimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak AN sebagai ketua LPMD desa Seren Selimbau. *“Penggunaan dana desa kebanyakan untuk operasional pemerintah desa dan membeli alat-alat kantor saja, tidak ada dampak signifikan dalam meningkatkan penggunaan”*. Hal senada juga dikatakan oleh bapak YF selaku warga masyarakat desa Seren Selimbau berikut hasil wawancaranya : *“Pemerintah desa Seren Selimbau banyak sekali mengeluarkan uang untuk biaya operasional yang saya rasa kurang menunjang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.”* Tetapi sekretaris desa Seren Selimbau dalam hasil wawancara berikut *“Pemerintah desa dalam melakukan belanja operasional tentu sudah sangat membutuhkan hal itu misalnya dalam pembelian laptop, laptop sangat diperlukan dalam melenggarakan pemerintah misalnya dalam pembuatan surat-surat dan juga pembelian printer sangat dibutuhkan karena selama ini masih menggunakan mesin tik”*.

Menurut Bpk MRS dalam hasil wawancara dengan peneliti beliau mengatakan bahwa *“Walaupun untuk program pemberdayaan masyarakat masih kurang akan tetap hal ini masih lebih baik dari tahun sebelumnya, perlu diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya program mengenai pemberdayaan masyarakat tidak pernah terusulkan karena desa seren selimbau menggunakan seluruh dana nya untuk pembangunan infrastruktur desa saja dan hanya pada tahun ini program pada bidang pemberdayaan masyarakat dibuat.”* Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan harus dapat terlaksana dengan baik berikut adalah hasil wawancara dengan ketua tim penggerak PKK desa seren selimbau ketika ditanyakan mengenai kegiatan posyandu apakah berjalan dengan baik atau tidak *“Dalam setiap kegiatan posyandu selalu berjalan dengan baik, hal ini juga menjadi suatu keperdulian oleh pemerintah desa untuk kesehatan masyarakat”*. Dari hasil wawancara dengan ibu RH adalah sebagai berikut. *“Dalam melaksanakan program posyandu pemerintah desa seren selimbau sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini bisa mempermudah kami sebagai ibu-ibu kami tidak perlu pergi jauh-jauh ke puskesmas yang berada di kecamatan lumar karena posyandu dan puskesmas sudah di katakan di balai desa”*.

Selanjutnya menurut bapak RK selaku staff administrasi desa ketika ditanya apakah pemerintah desa benar-benar melaksanakan pengadaan barang berupa laptop dan printer, jawaban beliau adalah sebagai berikut *“Pemerintah desa pada tahun ini benar-benar telah mengadakan pembelian berupa 2 unit laptop dan 1 printer. Laptop yang ada sekarang sudah saya gunakan untuk membantu keperluan desa dan sudah tidak lagi menggunakan mesin tik dalam hal ini saya yang bertanggungjawab terhadap laptop ini. Sedangkan untuk laptop satunya lagi digunakan oleh KAUR pemberdayaan masyarakat dan printer sudah ada dikantor desa, karena printer yang lama yang ada dikantor desa ini sudah tidak bisa digunakan.”* Jika melihat hasil penelitian diatas meskipun pelaksanaan kegiatan yang di biayai oleh dana desa dapat berjalan dengan baik akan tetapi masih ada sedikit kekurangan terkait optimalisasi dana desa dana yang tersedia 70% untuk pemberdayaan masyarakat masih belum digunakan dengan optimal, hal ini lah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan juga masyarakat memang pembangunan infrastruktur itu penting tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa seren selimbau ketika ditanya usaha apa yang akan dilaksanakan pemerintah desa seren selimbau dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat jawaban beliau adalah sebagai berikut “Nah untuk kedepannya kami akan coba menggali lagi apa yang menjadi keinginan masyarakat, agar masyarakat juga ikut aktif dalam memberikan masukan pembanguana bagi pemerintah desa sehingga tercipta pemerataan Pembangunan yang menyentuh seluruh unsur masyarakat.”Selanjutnya di tambahkan juga oleh sekertaris desa Seren Selimbau dalam wawancara sebagai berikut. “Untuk kedepannya pemerintah akan lebih mengedepankan untuk pengadaan alat penunjang dalam pertanian seperti mesin perontok jagung dan mesin perontok padi, karena mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa adalah petani, dan juga pemerintah desa akan mengadakan pelatihan-pelatihan tim penggerak PKK”.

PEMBAHASAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada bupati dan BPKAD Bengkayang melalui camat. Pemerintah desa didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus sesuai prinsip dasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dapat mengakui, mengukur dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembuatan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format yang ada dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan KAUR Keuangan adalah sebagai berikut: “Dalam penyusunan SPJ pemerintah selalu menyusun sesuai dengan format yang ada dan ketentuan yang berlaku”. Hal serupa juga dikatakan oleh Bendahara Desa dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Dalam pembuatan SPJ selain mengikuti format yang ada tidak lupa juga melampirkan semua lampiran yang diperlukan”. Dalam pembuatan laporan Pertanggung Jawaban pemerintah desa Seren Selimbau sudah melaksanakan sesuai dengan tahap yang berlaku dan dalam pembuatannya juga selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan dalam pelaporan sehingga LPJ yang dibuat oleh desa Seren Selimbau menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Kecamatan Lumar, hal ini senada dengan yang di katakan oleh sekertaris desa Seren Selimbau dalam wawancara sebagai berikut: “Dalam pembuatan SPJ desa Seren Selimbau tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu, bahkan banyak dari desa yang lain melihat dan menjadikan contoh dalam pembuatan SPJ mereka”. Selain membuat laporan pertanggung jawaban salah satu prinsip pengelolaan Dana Desa adalah harus ada evaluasi kegiatan dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam setiap tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah desa tidak hanya melaksanakan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat dan daerah saja akan tetapi pemerintah desa tidak boleh melupakan masyarakat, masyarakat juga membutuhkan informasi dan ikut dan mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana didesa. Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa Seren Selimbau tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di desa Seren Selimbau : Wawancar dengan Ibu SM selaku kepala dusun : “Selama ini saya tidak pernah diundangoleh pemerintah desa untuk melaksanakan rapat evaluasi sehingga saya tidak pernah tau apakah ada permasalahan atau tidak dalam penggunaan dana desa”. Hal senada juga dikatakan oleh Sdr. AD selaku ketua karang taruna : “Pemerintah desa hanya melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan BPKAD tetapi kalau kepada masyarakat tidak pernah”. Karena kurangnya keterbukaan informasi seperti ini seringkali membuat masyarakat bertanya-tanya apakah dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengalami masalah atau tidak. Dan ketika ditanya apa usaha dari pBemerintah dalam mengatasi hal ini berikut jawaban dari Bendahara desa Seren Selimbau :

“Untuk mengatasi hal ini tentu juga harus ada kerjasama dengan masyarakat desa meskipun pemerintah sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan evaluasi tetapi jika masyarakat tidak hadir akan percuma”.

Terkait tentang pengoptimalan Dana Desa Di Daerah Perbatasan. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanakan Musrembang desa. Walaupun dalam tahapannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan belum terlalu mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kurang optimalnya hasil musrembang yang telah dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya masukan dari masyarakat mengenai program-program yang diinginkan masyarakat untuk dapat terlaksana, dalam pembuatan program kebanyakan hanya usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan prioritas kebutuhan agar setiap kegiatan yang ada benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan jika melihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, peningkatan yang ada masih kurang signifikan hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat yang dijalankan masih sangat sedikit belum mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pengoptimalan Dana Desa dilihat dari segi perencanaan menurut Kepala Desa Seren Selimbau ada berbagai usaha yang akan dilakukan yaitu dengan melihat hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat desa Seren Selimbau.

Pada tahap pertanggungjawaban dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dalam tahapan penyusunan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format dan tahapan yang ada. Dalam pembuatan SPJ pemerintah desa Seren Selimbau juga tidak pernah terlambat dalam memasukan laporan, sehingga SPJ yang dibuat oleh pemerintah desa Seren Selimbau bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain.

Meskipun pada tahapan pembuatan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik tetapi dalam proses evaluasi kegiatan pemerintah tidak mempertanggungjawabkan didepan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengerti apakah pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat berbagai sumber mengenai Optimalisasi Dana Desa di Daerah Perbatasan menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Dana Desa di Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar – Kabupaten Bengkayang dalam proses pengelolaan Dana Desa sudah melalui tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian pada tahapan perencanaan dilihat dari musrembang yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Dana Desa masih kurang optimal karena pada proses musrembang tingkat keaktifan tokoh masyarakat yang dalam hal ini mewakili masyarakat desa dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu adanya peningkatan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang. Berdasarkan

hasil penelitian pada tahap pertanggung jawaban masih belum optimal, meskipun pembuatan SPJ sudah berjalan sesuai dengan format yang ada akan tetapi pemerintah desa tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat yaitu dimana dalam tahapan ini belum sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa yaitu perlu adanya transparansi kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat optimalisasi dana desa di daerah perbatasan diantaranya yaitu keaktifan para tokoh masyarakat dalam memberikan masukan serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sarannya sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Desa Seren Selimbau dalam proses pengelolaan Dana Desa lebih dioptimalkan lagi memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa Seren Selimbau.
2. Pada tahap pertanggungjawaban kiranya diharapkan pemerintah desa Seren Selimbau lebih terbuka mengenai evaluasi kegiatan agar masyarakat juga mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh pemerintah desa karena masyarakat sebagai salah satu pendamping dan pengawas kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa.
3. Sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat juga harus dituntut aktif dalam memberikan masukan mengenai prioritas kebutuhan karena kegiatan musrembang desa. Merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mencurahkan harapan mengenai kebutuhan apa saja yang ingin dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa karena penggunaan dana desa tidak hanya untuk kegiatan fisik semata tapi juga mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Annivelorita (2015),”Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan”.eJournal Administrasi Negara. Vol 3, No. 5:1712-1726
- Fuji.(2015). Pengertian Pembangunan Fisik. <http://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian-pembangunanfisik.html> (diakses pada tanggal 9 Februari 2016).
- Haryanto, Tri. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih
- Hernowo, Basah. 2004. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
- Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4
- <Http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.46.
- <Http://adesidiq.blogspot.co.id/2011/01/ptk-optimalisasi-penggunaan-vcd.html>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 11.13
- Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminata (1997, h. 753)
- <Http://digilib.unila.ac.id/315/10/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 12.40.
- <Http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-1-00531-MTIF%202.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 12.41.
- John P.,Adrianus Devaczy (2015),”Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang”. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan. Vol 4 (1)
- Morrison, 2014, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Premadia Group.

- Mardikanto, T. 2010. Model-model pemberdayaan Masyarakat. Cetakan 1. Uns Press. Surakarta
- Putra, Chandra Kusuma; Pratiwi, Ratih Nur dan Suwondo (),”Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa(Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP).Vol.1, No. 6:1203-1212.
- Sedarmayanti, Syarfudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.Afabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Bandung : Alfabeta.
- Surjadi, A. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Kotak Pos.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Gita Media Press, 2015) . h. 562
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014